



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Demikian Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	5
II.1 Evaluasi Renja Bapenda sampai dengan triwulan I tahun 2025	5
II.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA	31
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Perubahan renja Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan perubahan renja yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 dan perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Perubahan Renja tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, perubahan renja didasarkan pada hasil evaluasi renja Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA perubahan Badan pendapatan Daerah Kab.Sidrap Tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap "Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14)

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan rencana awal dengan kondisi, kebutuhan atau kebijakan terbaru yang mungkin tidak terantisipasi saat renja awal.

b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada keuangan daerah, kebutuhan SKPD serta perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan.
3. Mewujudkan pengelolaan pendapatan yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Renja Sampai Triwulan I Tahun Berkenan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota
 - a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - h. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2. Program pengelolaan pendapatan daerah
 - a. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pencapaian Renstra s/d Triwulan I tahun 2025 dapat di lihat pada tabel II.1

TABEL II.1.a
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPENDA DAN
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN								
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah	100 %		100				
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	26.32	100	26.32	0.263	26.32	26.32

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dok	1	4	1	25	1	16.67
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6 Lap.	4	15	4	27	4	66.67
..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	27.56	100	27.56	27.56%	28	27.56
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3,204 Org/Bulan	263	952	263	28	263	8.21
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3 Dok	6	24	6	25	6	200.00
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.27	100	1.27	1	1.27	1.27

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	900 Buah	0	196	0	-	-	0.00
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1110 Buah	0	0	0	-	-	0.00
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	39391 Blok	0	1	0	-	-	0.00
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Kali	3	40	3	8	3	1.00
..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100 %	0	100	0	0.00	0.00	0.00
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	95 Unit	0	0	0	-	-	0.00
..01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	0	4	0	-	-	0.00

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	25.00	100	25.00	25.00	50	50.00
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 Bulan	3	12	3	25	3	8.33
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Bulan	3	12	3	25	3	8.33
..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1.56	100	1.56	1.56	1.56	1.56
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78 Unit	1	12	1	8	1	1.28

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6 Unit	0	50	0	-	-	0.00
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150 Unit	0	2	0	-	-	0.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah	100 %	19.89	100	19.89	20	20	19.89
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100 %	19.89	100	19.89	20	20	19.89
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	6 Dok	1	1	1	100	1	16.67
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	15 Dok	4	10	4	40	4	26.67

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	3 Laporan	0	2	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	3 Unit	0	2	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12 Laporan	1	4	1	25	1	8.33
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	3 Laporan	0	1	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	102,000 Obyek pajak	1193	50,000	1193	2	1,193	1.17

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2025) 9=7	Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 10=(9/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	25,101 Dok	10418	10,000	10418	104	10,418	41.50
5.02.04.2.01.09	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	78,000 Dok	10418	300,000	10418	3	10,418	13.36
5.02.04.2.01.10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12 Dok	1	4	1	25	1	8.33
5.02.04.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12 Laporan	1	4	1	25	1	8.33
5.02.04.2.01.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	36 Laporan	3	12	3	25	3	8.33

II.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, yang juga tidak terlepas dari masalah gender yang merujuk kepada kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan **akses** dan **kontrol** terhadap sumber daya pembangunan, **partisipasi** dalam kegiatan pembangunan dan dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan **manfaat** dari hasil pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan pendapatan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah mencapai target sebesar 97.76% dan retribusi daerah khususnya yang dikelola Bapenda sebesar 75.15%, dan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 mencapai 100% .Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah menghadapi masalah yaitu belum tercapainya target penerimaan pajak & retribusi daerah disebabkan karena:

1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
2. Lemahnya perencanaan, implementasi dan pengawasan dalam otoritas penagihan pajak daerah
3. Potensi-potensi pajak yang bisa menjadi sumber pajak belum diidentifikasi dengan baik

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga memiliki faktor penghambat dan faktor pendorong, yaitu :

1. Faktor Penghambat
 1. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
 2. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
 3. Kurangnya SDM
2. Faktor Pendorong
 - a. Adanya inovasi untuk pengembangan dan peningkatan PAD serta pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat atas kebijakan tentang pajak daerah
 - c. Semakin intensnya penagihan pajak daerah
 - d. Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia pengelola pajak

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah yang didasarkan pada perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan Visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”

Penyusunan dokumen Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029.

Sesuai hasil evaluasi, perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai. Pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Badan Pendapatan Daerah sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rumusan program dan kegiatan perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 terdiri dari dua program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program pengelolaan pendapatan daerah, 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut :

TABEL III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN				14,720,137,000			13,950,690,000	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretariat Badan	100%	11,148,740,000		Sekretariat Badan	100%	10,865,617,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Badan	100%	14,442,000		Sekretariat Badan	100%	8,247,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	4 Dok	6,366,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	4 Dok	6,366,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	15 Lap.	8,076,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	15 Lap	1,881,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Sekretariat Badan	100%	9,473,048,100		Sekretariat Badan	100%	9,293,447,100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji & tunjangan	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1068 org/bulan	9,454,091,100		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	952 org/bulan	9,274,742,100	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	12 dokumen	18,957,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	24 dokumen	18,705,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Sekretariat Badan	100%	322,622,000		Sekretariat Badan	100%	195,279,500	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	196Paket	6,452,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	196Paket	6,452,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1 Paket	61,050,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1 Paket	61,340,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	40 Laporan	255,120,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	40 Laporan	127,487,500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Badan	100%	53,433,000		Sekretariat Badan	100%	55,775,000	-
Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	15 unit	53,433,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	4 unit	55,775,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Badan	100%	1,092,200,900		Sekretariat Badan	100%	1,074,874,400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	191,500,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	191,500,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	900,700,900		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 laporan	883,374,400	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Sekretariat Badan	100%	192,994,000		Sekretariat Badan	100%	237,994,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	10 unit	114,324,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 unit	119,324,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	28,670,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	50 unit	28,670,000	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	50,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	2 unit	90,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,571,397,000		Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,085,073,000	-
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,571,397,000		Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian	100%	3,085,073,000	-
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub. Bid. Perencanaan	2 dokumen	10,868,000		Sub. Bid. Perencanaan	1 Dokumen	43,225,000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub. Bid. Perencanaan	12 dokumen	43,600,000		Sub. Bid. Perencanaan	10 Dokumen	41,066,500	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	4 laporan	290,585,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	2 Laporan	74,734,000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	2 unit	88,600,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	2 Aplikasi	121,900,000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD II	4 laporan	115,767,000		Sub. Bid. PAD II	129186 Objek Pajak	58,571,000	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD II	1 laporan	115,541,000		Sub. Bid. PAD II	2 Aplikasi	128,946,500	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP-nya	Sub. Bid. PAD II	34000 objek pajak	2,413,991,500		Sub. Bid. PAD II	50000 Obyek Pajak	2,370,856,500	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2025							
		SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
Penetapan Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	8367 dokumen	7,519,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	10000 dokumen	7,519,000	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD II	26000 dokumen	257,121,000		Sub. Bid. PAD II	300000 dokumen	138,833,000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan pajak daerah	Sub. Bid. Pengendalian	4 dokumen	97,601,000		Sub. Bid. Pengendalian	4 dokumen	51,543,000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi daerah	Sub. Bid. Evaluasi	4 laporan	90,862,500		Sub. Bid. Evaluasi	4 laporan	47,878,500	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	4 laporan	39,341,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	12 laporan	20,205,000	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan Visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera” yang didukung oleh 7 (tujuh) Misi dan 14 (empat belas) Program Unggulan. memberi dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : “terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional”.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program & kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat bermanfaat bagi kemakmuran segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19710318 199101 1 003

